

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai sistem pengendalian intern aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Secara umum, sistem pengendalian intern telah diterapkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur walaupun penerapannya belum optimal. Hal tersebut terbukti dengan temuan BPK dari audit Laporan Keuangan tahun 2018. Laporan ini menunjukkan bahwa pengendalian intern atas aset tetap masih lemah, seperti pada penerapan:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian sudah diterapkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur yang memberikan suasana positif sehingga mendukung dalam kegiatan bekerja sehari-hari.

2. Penilaian risiko,

Dalam penilaian risiko, masih terdapat risiko yang diidentifikasi dalam pengelolaan aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, di mana pada tahap penatausahaan yang belum tertib, kegiatan rehabilitasi dicatat sebagai aset tetap baru, pengujian aset tetap baru belum dapat dijelaskan dan perbedaan nilai aset tetap, sehingga mengenai informasi aset

tetap belum lengkap dan akurat. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, di mana pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah telah melakukan analisis risiko dengan menerapkan kebijakan untuk memastikan berkurangnya risiko, di mana mencakup:

- Pembinaan sumber daya manusia
- Pemisahaan fungsi
- Melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting
- Pencatatan yang akurat dan tepat waktu

3. Aktivitas pengendalian, kegiatan pengendalian yang dituangkan dan melekat dalam bentuk kebijakan dan prosedur kegiatan, dimana pada:

- penelaah/review kinerja masih menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan dalam penyajian data/informasi dalam laporan maka perlu segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan atau kesalahan dan melakukan penelaah kinerja secara berkala.
- Pembinaan sumber daya manusia dimana masih kurangnya kompetensi, kurangnya pelaksanaan bimbingan teknis yang menambah pemahaman dan wawasan serta lebih spesifik, beban pekerjaan yang terlalu banyak, kurangnya tanggung jawab dan komitmen.

- Pengendalian fisik terhadap aset tetap masih belum efektif, karena setiap aset tetap masih ada yang belum diberikan penomoran serta melakukan pencocokan aset tetap,
- Pemisahan tugas telah dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing staf.
- Transaksi yang terjadi diotorisasi oleh pihak yang tidak berwenang mengakibatkan salah peng-input-an data sehingga terjadinya ketidakcocokan data dalam sistem dengan keadaan yang sebenarnya.
- Pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pada bidang aset telah melakukan pencatatan sesuai dengan transaksi dan kejadian. Namun belum melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, dalam pelaksanaan pencatatan yang akurat atas transaksi dan kejadian.

Dalam kegiatan pengelolaan barang milik daerah/aset mulai dari perencanaan sampai dengan tuntutan ganti rugi belum berjalan dengan baik sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 06 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik Daerah, dengan menimbang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di mana:

- a. Perencanaan, terkadang dalam merencanakan kebutuhan barang tidak sesuai kebutuhan atau sering berlebihan

sehingga kebutuhan barang di OPD yang seharusnya diadakan tapi karena kondisi anggaran yang tidak memungkinkan sehingga kebutuhan barang tersebut belum bisa direalisasikan.

- b. Pengamanan dan pemeliharaan, masih banyak aset daerah yang belum sempat terdata dan mengalami kerusakan dan belum dibukukan secara tepat sesuai SAP.
 - c. Penatausahaan, masih terdapat kesalahan pencatatan mengenai aset, yang mengakibatkan belum optimal dalam penatausahaan, seperti: masih terdapat pencatatan aset secara gabungan dan kurangnya koordinasi sehingga masih terdapat aset tetap yang belum dikonsolidasikan kelaporan keuangan.
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian belum terlaksana dengan baik. Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan aset menyebabkan aset yang tidak produktif, masih tercatat dalam laporan keuangan.
4. Informasi dan komunikasi belum memadai, di mana jaringan yang kurang baik sehingga informasi mengenai aset belum lengkap, mengakibatkan daftar Aset Tetap belum up to date, manajemen perusahaan kurang memberikan informasi tentang keberadaan aset tetap, sehingga aset tetap yang disajikan

didalam laporan keuangan belum menyajikan nilai buku (book value) dari aktiva tersebut.

5. Dalam pelaksanaan pemantauan yang belum efektif sehingga Perlu pertanggungjawab penuh dalam usaha pengawasan internal terhadap aset tetap. Manajemen perlu memperhatikan dan menentukan cara yang baik dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien agar pelaksanaan pemantauan secara periodik dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka disarankan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, yaitu mengenai unsur-unsur sistem pengendalian intern terhadap aset tetap:

1. Perlunya dilakukan analisis risiko dengan menerapkan kebijakan untuk memastikan berkurangnya risiko yang telah teridentifikasi pada penilaian resiko, di mana mencakup:
 - Pembinaan sumber daya manusia
 - Pemisahaan fungsi
 - Melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting
 - Pencatatan yang akurat dan tepat waktu
2. Dalam aktivitas pengelolaan barang milik daerah sebaiknya memperhatikan:

- a. Review kinerja perlu di lakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan atau kesalahan dan melakukan penelaah kinerja secara berkala.
 - b. Pengendalian fisik aset harus diberikan penomoran dan sebaiknya melakukan pencocokan terhadap laporan keuangan.
 - c. Sebaiknya setiap transaksi harus di torisasi oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga tidak terjadi kesalahan dalam peng-inputan data.
 - d. Perlunya koordinasi dalam merencanakan kebutuhan barang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.
 - e. Sebaiknya BKAD kabupaten Flores Timur lebih teliti dan melakukan koreksi setelah melakukan pencatatan dalam penatausahaan aset tetap.
 - f. Sebaiknya melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap BMD/ aset tetap yaitu dengan memberikan teguran dan sanksi yang tegas terhadap pegawai yang tidak mengembalikan barang ketika pindah atau pensiun.
3. Dalam informasi dan komunikasi perlu dilakukan koordinasi secara rutin sehingga informasi mengenai aset selalu *Up To date*, manajemen perlu memberikan informasi tentang keberadaan aset tetap, sehingga pencatatan aset yang mendukung laporan keuangan secara lengkap dan terjamin keandalannya serta dilakukan rekonsiliasi secara

berkala untuk mengidentifikasi terjadinya kesalahan dalam pencatatan mengenai aset tetap sejak dini.

4. Meningkatkan kegiatan pemantauan aset, perlu pertanggungjawab penuh dalam usaha pengawasan internal terhadap aset tetap. Manajemen perlu memperhatikan dan menentukan cara yang baik dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien agar dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Dimana untuk tercapai tujuan dari pengendalian intern di mana memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2011. *“Sistem Akuntansi Sektor Publik”*. Jakarta: Salemba Empat
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018. *“Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT Tahun Anggaran 2018”*
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting “Pengantar Akuntansi”*, Buku 2, Edisi 21, Salemba Empat: Jakarta.
- Bastian, Indra.2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*.Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Bintang Santri Br, Panjaitan (2019) Pengendalian Intern atas Aset Tetap pada Kantor Pemerintah Pangulu Pematang Simalungun kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3492>
- Bpkad.banjarkab.go.id.Penyimpangan Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.
[http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/03/08/penyimpangan-dalam-pengelolaan-barang- milik-daerah/](http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/03/08/penyimpangan-dalam-pengelolaan-barang-milik-daerah/)
- Halim, Abdul. 2012. *“Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah”*.Jakarta: Salemba Empat
- Jenni Napitupulu (2018) Pengendalian Intern Aset Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Medan.
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1520>
- Tempo.co.2020. PT Semen Kupang Diduga Caplok Lahan Pemda 116 Ha.
[http://bisnis.tempo.co.read hasil web PT semen Kupang Diduga Caplok Lahan Pemda 116 Ha-Bisnis Tempo.co](http://bisnis.tempo.co.read%20hasil%20web%20PT%20semen%20Kupang%20Diduga%20Caplok%20Lahan%20Pemda%20116%20Ha-Bisnis%20Tempo.co)
- Kurniawan, Topan. (2013) Analisis sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Kabupaten Musi Bayuasin.
<http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1232/1/>

Romney, Steinbart (2014) “Tujuan Pengendalian Intern” <http://www.repository.trisakty.ac.id>.

Mulyadi.(2016) “*Sistem Akuntansi Jakarta*”:Salemba Empat

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 06 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Bupati Flores Timur No 56 Thn 2017 tentang Kode Etik Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang “*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang “*Standar Akuntansi Pemerintah*”

Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang “*Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*”

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 “*Pengelolaan Barang Milik Daerah*”

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07

<http://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintah-nomor-07>